

**Analisis Penyusunan Rencana Kerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Bagian BKAD Kota Medan**

Rabiatun Adawiyah¹ Cindy Kumala Dewi² Halimah Helmi³, Zainarti⁴
Program Studi Manajemen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Rabiatunadawiyah417@gmail.com , cindykumaladewi02@gmail.com ,
halimahhelmi18@gmail.com, zainartimm60@gmail.com

ABSTRACT

The work plan is referred to as a process that has the potential to achieve the targets to be achieved for the next year while taking into account the potential, opportunities and obstacles that may arise, the work plan includes the vision and mission, as well as the goals and targets of an organization, and also regarding the main tasks and organizational functions, as well as programs and activities that include work planning to be carried out within one year. The preparation of work planning is the implementation of planning concepts that play a role in organizational managerial processes as a determining factor in the success of achieving goals and targets and achieving the vision and mission of an organization. Preparation of work plans in the Medan City Regional Finance and Asset Agency, compiled in sync using State Ministerial Regulation number 86 of 2017 concerning norms for planning, controlling and evaluating regional development, assessing norms on work plans including vision, mission, objectives, policies, events and activities will be implemented within one year. appropriate use identification and urgent disputes and use refers to income, ability to achieve performance, strategic planning, and synergy using national policies, against the aims and objectives of the acquisition sponsor at the Finance Agency and regional assets of the Medan City Levy Unit; Regional Work Units (SKPD) must produce capacity targets from the proposed activities in their budgets. Delegation of powers is not only the right to use the law, but also has consequences for that role. Regarding the use of financial data, SKPD must always know how much the APBN has entered.

Keywords: *BKAD, Work Plans, Regional Financial Control and Evaluation, Implementation of Regional Opinions.*

ABSTRAK

Rencana kerja dimaksud sebagai suatu proses yang memiliki potensi untuk mencapai target yang ingin dicapai untuk satu tahun berikutnya dengan tetap memperhatikan potensi, peluang dan hambatan yang mungkin timbul, rencana kerja tersebut memuat visi dan misi, serta tujuan dan sasaran organisasi, serta mengenai tugas pokok dan fungsi organisasi, serta program dan kegiatan yang memuat perencanaan kerja yang akan dilaksanakan dalam waktu satu tahun. Penyusunan

perencanaan kerja merupakan implementasi konsep perencanaan yang berperan dalam proses manajerial organisasi sebagai faktor penentu keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran serta pencapaian visi dan misi suatu organisasi. Penyusunan rencana kerja di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan, disusun secara sinkron dengan menggunakan Peraturan Menteri Negara nomor 86 Tahun 2017 tentang norma perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, menilai norma pada rencana kerja termasuk visi, misi, tujuan, kebijakan, acara dan kegiatan akan dilaksanakan dalam waktu satu tahun. identifikasi penggunaan yang tepat dan perselisihan mendesak dan penggunaan mengacu pada pendapatan, kemampuan untuk mencapai kinerja, perencanaan strategis, dan sinergi menggunakan kebijakan nasional, terhadap maksud dan tujuan sponsor akuisisi di Badan Keuangan dan aset daerah Unit Retribusi Kota Medan; Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menghasilkan target kapasitas dari usulan kegiatan dalam anggarannya. Delegasi kekuasaan tidak hanya hak untuk menggunakan hukum, tetapi juga memiliki konsekuensi untuk peran itu. Terkait penggunaan data keuangan, SKPD harus selalu mengetahui berapa besaran APBN yang masuk.

Kata kunci: *BKAD, Rencana Kerja, Pengendalian dan Evaluasi Keuangan Daerah, Implementasi Pendapat Daerah.*

PENDAHULUAN

BKAD artinya unsur pendukung tugas Walikota, dipimpin sang seseorang kepala daerah yang bertanggung jawab pada Walikota Medan Melalui Sekretaris daerah, BKAD memiliki tugas sebagai Perangkat daerah yg bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan wilayah serta pengelolaan aset/barang wilayah mulai dari proses penganggaran sampai menggunakan proses pertanggungjawaban APBD mempunyai tugas meliputi software pelayanan administrasi serta kegiatan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah/ barang-barang.

Dengan Peraturan Menteri di Negeri angka 77 Tahun 2020 perihal Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan daerah, Pengelola Keuangan wilayah ialah pejabat pengelola keuangan daerah yg melaksanakan semua kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, software, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan wilayah, agar semakin meningkatnya perkembangan serta laju pertumbuhan penduduk Kota Medan, Melalui perda Kota Medan nomor 2 Tahun 2011 wacana perubahan sesuai Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi serta tata Kerja Perangkat daerah Kota Medan, Bagian Keuangan Sekretariat wilayah Kota Medan yang terdiri berasal lima bagian ditingkatkan menjadi Badan Pengelola Keuangan wilayah yg tugas utamanya ialah mengelola keuangan pemko Medan.

aktivitas pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi penyusunan bahan penyusunan serta kebijakan keuangan wilayah berupa penyusunan panduan penyusunan hukum, panduan administrasi keuangan daerah, panduan pelaporan keuangan SKPD, selain melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan bimbingan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah. sementara itu, pengelolaan aset wilayah berupa pemberian panduan penyusunan planning kebutuhan barang milik daerah serta planning pemeliharaan barang milik wilayah, pedoman administrasi serta penyusunan aset daerah, dan panduan pengelolaan aset daerah. pada aplikasi kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset/barang wilayah pada lingkungan Pemko Medan sinkron memakai peraturan perundang-undangan Negara

Badan Pengelola Keuangan wilayah Kota Medan bisa menjadi wadah pelayanan publik di rangka penerapan tatacara kelola pemerintahan yg baik. Pengembangan dan peningkatan pengelolaan keuangan wilayah yang bertujuan buat penataan organisasi perangkat daerah yang profesional dan berkualitas pada sistem dan penyusunan aturan Pendapatan dan Belanja wilayah sebagai sarana pengembangan dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah. Penataan organisasi perangkat daerah yg profesional buat pengawasan dan akuntabilitas, kualitas dan penyusunan pelaporan dan pengelolaan keuangan daerah.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian serta prosedur penelitian merupakan tahapan-tahapan yang dimiliki dan dicoba menggunakan peneliti di bagan untuk menghitung data atau informasi serta melakukan analisis berita atau variabel terhadap informasi yg sudah diperoleh. Penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dengan aneka macam sumber yang terdapat. Data yg diperoleh dari buku serta jurnal dirangkum sang peneliti dari refrensi yg tersedia sebagai sebuah penelitian berjudul Penyusunan planning Kerja SKPD Data ini mencakup data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam istilah-kata yg diperoleh asal aneka macam pengumpulan data asal analisis dokumen, dari kitab . Data ini bisa dikelompokkan berdasarkan kategori atau sumber yg ada menjadi pengelompokan sempurna yang bersumber asal data yg ada kemudian dikelompokkan dan dianalisis ke pada akibat penelitian ini.

Metode dan mekanisme penelitian buat penelitian naratif bagi Sugiyono 2018 adalah sesuatu yg dilakukan buat mengenali nilai variabel bebas, baik satu variabel atau lebih (bebas) tanpa membentuk analogi atau terkait menggunakan variabel lain. merupakan, penelitian ini hanya berfokus pada mengenali bagaimana syarat variabel itu sendiri tanpa ada konsekuensi atau ikatan menggunakan variabel lain seperti penelitian atau hubungan. Penelitian ini bertujuan buat mengungkapkan secara khusus suatu

insiden yang terjalin di rakyat , penelitian ini menyampaikan serta berupaya merespon masalah-kasus yg saling terkait dengan informasi yang sudah ditemukan menggunakan metode penyajian, analisis, dan interpretasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rencana Kerja

Menurut Husein Umar (2009:65) "planning kerja ialah proses yang tidak pernah berakhir, Bila planning tadi telah ditentukan, maka dokumen perencanaan terkait harus dilaksanakan. sebab perencanaan ialah pemilihan serangkaian aktivitas dan pengambilan keputusan perihal apa yg wajib dilakukan, kapan, bagaimana, serta menggunakan siapa.

Penyusunan planning Kerja pada suatu instansi sebaiknya dilakukan setelah perencanaan pemrograman di taraf gerombolan target dan target telah terselesaikan. Perencanaan yang dicoba pada suatu badan organisasi buat mendukung semua acara yang akan dilaksanakan di lapangan, contohnya terpaut asal daya manusia yg meliputi energi yg diharapkan pada perangkat lunak aktivitas yang dilakukan di lapangan. planning Kerja badan penyelenggara ingin lebih memperbaiki situasi buat memenuhi impian acara dan perencanaan yg akan dilakukan. Proses penyusunan planning Kerja pada suatu badan organisasi harus didampingi oleh semua asal daya manusia yang bisa bersaing pada perencanaan yang akan dilaksanakan. yang merupakan harapan, kritik serta saran atau virtual dari semua asal daya yang berfungsi sangat berarti pada membantu serta mendukung badan organisasi dalam menjamin kebijakan penting konkretisasi proses perencanaan planning Kerja.

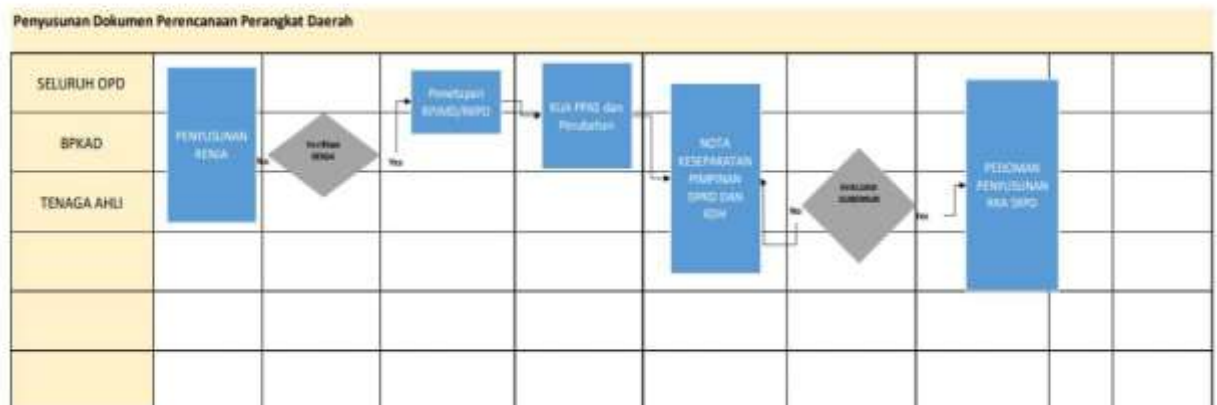
Rencana Kerja yang mencakup program dan kegiatan Badan Keuangan daerah Kota Medan artinya dokumen perencanaan tahunan, menjadi aplikasi tahapan planning Strategis, buat jangka waktu satu tahun aturan yg disusun mengacu di hasil penilaian pelaksanaan tahun sebelumnya berdasarkan Wijayanto (2012: 75) mendefinisikan, "Perencanaan adalah proses menetapkan tujuan serta menentukan cara buat mewujudkan tujuan ini. Setiap organisasi tidak dapat tinggal asal proses perencanaan". sebagai dokumen perencanaan tahunan, planning Kerja BKAD Medan mempunyai kiprah yg sangat penting di mengarahkan semua kegiatan tahunan menuju pencapaian Visi juga Misi yg sudah ditetapkan. Selain itu, rencana Kerja BKAD mempunyai arti strategis di mendukung pelaksanaan acara pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, menjadi akibatnya asal awal persiapan hingga penetapan dokumen OPD Renja wajib mengikuti prosedur serta alur penyusunannya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri dalam Negeri angka 86 Tahun 2017 wacana tata cara Perencanaan, Pengendalian dan penilaian Pembangunan wilayah, norma evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang rencana rencana Pembangunan Jangka Panjang Pembangunan Jangka Menengah wilayah serta wilayah, serta tata cara Perubahan planning Pembangunan Jangka Menengah daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah wilayah dan rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Planning program serta aktivitas Badan Keuangan serta Aset daerah Kota Medan dibentuk berdasarkan acara dan kegiatan bidang teknis pelaksana. Matriks planning acara serta aktivitas disusun sesuai lampiran Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017. menurut Wahyudiono (2014:34) "biaya umum serta administrasi mencakup biaya administrasi dan supervisi kantor, pemeliharaan catatan akuntansi, biaya pembelian, biaya surat menyurat, penagihan piutang serta lain-lain".

Pagu indikatif pelaksanaan planning acara serta kegiatan prioritas Badan Keuangan dan Aset daerah Kota Medan

SKPD : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah



Penyusunan planning Kerja merupakan kegiatan buat mengimplementasikan desain pemrograman, pemrograman mempunyai posisi yang bermakna pada seluruh cara administratif suatu badan, yang sudah menetapkan pemrograman menjadi aspek penentu keberhasilan dan pendapatan yang ditujukan pada badan target terkait menggunakan perencanaan ini mempunyai peran yang sangat penting pada proses manajerial pada suatu organisasi, yg memilih perencanaan menjadi keliru satu faktor yg berpengaruh dalam keberhasilan serta pencapaian dan tujuan suatu organisasi. Perencanaan ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan identifikasi dampak yg tidak sempurna dampak efek dinamika lingkungan yg akan dialami. Pemrograman ini

ialah salah satu cara serta proses yg melibatkan penyediaan atau pilihan penggunaan sumber daya yg terdapat buat mencapai tujuan tertentu yg akan terjadi di masa depan.

planning program serta aktivitas yg akan dilaksanakan buat mencapai visi serta misi Badan Keuangan daerah adalah menjadi berikut:

1. Program Dukungan Administrasi daerah

Kegiatan ini artinya tempat untuk mendukung pelayanan yg baik pada masyarakat, pelaksanaan semua program dan aktivitas yang kearifannya menunjuk pada peningkatan kualitas pelayanan prima pada aspek penyelenggaraan pemerintahan wilayah. Indikator outcome asal program ini ialah realisasi pelayanan administrasi aplikasi tugas PNS, anugerah honor serta tunjangan PNS, koordinasi penyusunan laporan akhir tahun SKPD, dan koordinasi serta penyusunan laporan keuangan SKPD bulanan. kegiatan program ini ialah aplikasi pelayanan kepada masyarakat buat pelayanan administrasi daerah yg terdiri berasal alat dan prasarana menjadi pelaksanaan pelayanan administrasi daerah.

2. program perbaikan untuk pengembangan sistem pelaporan kinerja serta pencapaian keuangan

panduan kebijakan acara ini ialah efektivitas serta efisiensi pelaksanaan aktivitas SKPD secara transparan dan bertanggung jawab yang tersaji pada suatu metode pengelolaan. sinkron memakai arah kebijaksanaan serta seni manajemen yang akan dicoba buat indikator yang akan terjadi yang dibutuhkan berasal acara ini adalah tersusunnya gosip penerapan semua kegiatan secara periodik dan bisa memprediksi keadaan riil tentang indikator keberhasilan dan kekalahan dalam pelaksanaan program.

PENCAPAIAN KINERJA 2022

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MEDAN

JANGA N	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Keuangan dan Aset Daerah	1. Penyusunan Keuangan Laporan keuangan	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu

		pemerintah daerah (Tahun 2022-2023)			
		2. Opini BPK atas Laporan Keuangan (2022-2023)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tepat waktu	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tepat waktu	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tepat waktu
		3. Penyusunan APBD yang berkualitas (2022-2023)			

Rencana	Anggaran	Realisasi	Persentase
Program Dukungan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.275.920.000	348.655.525	43,15%
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.605.283.800	545.979.900	43,14%
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.295.787.500	1.864.605.982	35,21%

dari tabel capaian kinerja di atas, bisa dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan laporan keuangan pemda telah sesuai menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan direalisasikan tepat waktu.
- 2) Pendapat BPK atas laporan keuangan pemda, selama lima tahun terakhir selalu mendapatkan Fair Opinion With Exception (WDP), hal ini disebabkan salah satu

- administrasi yang lemah dalam Pengelolaan Aset daerah, tetapi di tahun 2022 Pendapat BPK ialah wajar Tanpa pengecualian (WTP).
- 3) Penyusunan APBD yang berkualitas pada hal RKA/DPA APBD sinkron dengan pedoman dan peraturan yg berlaku dilakukan tepat waktu.
3. program manajemen properti regional
pedoman kebijakan program ini adalah efektivitas serta kemampuan melaksanakan tugas utama koordinasi penyusunan serta panduan pengelolaan BMD yg mencakup perencanaan kebutuhan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, serta pengendalian daerah.

Dasar Hukum **Rencana Kerja**

Dasar hukum kategorisasi Penyusunan rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset daerah Kota Medan Tahun 2022 mencakup:

1. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 perihal Keuangan Negara;
2. Undang-Undang angka 25 Tahun 2004 perihal Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah sentra dan pemda;
4. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 wacana Pemerintahan daerah
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 55 Tahun 2005 perihal Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4575 ;
6. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 wacana Pelaporan Keuangan serta Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian, serta evaluasi Pembangunan daerah, norma penilaian Rancangan perda tentang planning Pembangunan Jangka Menengah daerah dan

planning Pembangunan Jangka Menengah wilayah, planning Kerja Pembangunan wilayah;

9. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 70 Tahun 2019 perihal Sistem info Pemerintahan wilayah (SIPD)
10. Peraturan Menteri dalam Negeri angka 90 Tahun 2020 perihal pembagian terstruktur mengenai, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan wilayah
11. Peraturan Menteri pada Negeri nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan daerah
12. Peraturan Daerah Kota Medan nomor 15 Tahun 2017 wacana Pembentukan Perangkat wilayah Kota Medan;
13. Peraturan Daerah Kota Medan angka 19 Tahun 2020 wacana Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas serta Fungsi, dan Tata cara Kerja Perangkat daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Satuan Kerja Perangkat daerah merupakan perangkat wilayah pada pemerintahan wilayah yg berperan menjadi pusat tanggung jawab dalam pembangunan wilayah yang dipandu oleh pimpinan satuan kerja yg berlaku mirip perhitungan pengguna aturan atau pengguna barang. Aspek-aspek pengelolaan pembangunan daerah diakomodir di satu atau beberapa aktivitas dasar satuan kerja perangkat wilayah. Pandangan-pandangan tadi mencakup, pandangan kategorisasi serta koordinasi kebijakan yang diakomodir pada bentuk sekretariat, pandangan pengawasan yang diakomodir pada bentuk inspektorat, pandangan pemrograman yang diakomodir dalam bentuk instansi, pandangan faktor pendukung pada kategorisasi serta penerapan kebijakan wilayah tertentu secara spesifik serta diakomodir di instansi teknis daerah, serta pandangan perihal penerapan hal-hal wilayah yg diakomodir di biro pelayanan wilayah. Setiap Manusia harus mau dan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan dalam hidup ini segala bentuk pekerjaan harus dilakukan dengan benar dan baik (Dra Zainarti : 2021)

Peraturan Menteri di Negeri nomor 13 Tahun 2006 pasal 10 yang di pasal tersebut menyebutkan kewajiban Pengguna aturan (PA) ialah: menyusun RKA-SKPD, menyelenggarakan DPA-SKPD, melaksanakan kegiatan yg menyebabkan pengeluaran aturan atas penerapan perhitungan SKPD menjadi panduannya, pengujian klaim dan

instruksi pembayaran klaim, pemungutan penghasilan bukan pajak, perangkat lunak perjanjian kerjasama menggunakan pihak lain dalam batas-batas perhitungan sudah diformalkan, menandatangani standar Pelayanan Minimal SPM, mengatur pinjaman serta piutang yang sebagai tanggung jawab SKPD, mengatur barang milik wilayah atau kekayaan wilayah yg sebagai tanggung jawab SKPD, mengatur serta memberikan gosip keuangan SKPD serta memantau pelaksanaan perhitungan SKPD dan melaksanakan tugas pengguna anggaran atau penggunaan barang yang bersumber dari asal daya yg didelegasikan oleh ketua wilayah atas dasar Satuan Kerja Perangkat wilayah yang Bertanggung Jawab atas pelaksanaan asal tugasnya di ketua daerah melalui Sekretaris wilayah.

Kebijakan acara Pendapatan orisinil wilayah dilakukan oleh: Intensifikasi seperti penanganan pajak terutang atau pemugaran pengelolaan pajak daerah, dan pengenaan pajak liberal bagi pemilik indera angkutan bermotor yg mempunyai lebih berasal satu indera transportasi serta hal ini telah dituangkan pada bentuk penetapan Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2011 wacana Pajak daerah Provinsi Sumatera Utara aplikasi Peraturan Gubernur nomor 89 Tahun 2018 bertepatan memakai lepas 28 November 2018 wacana anugerah Ganti Rugi PKB atau BBNKB berupa:

- a. Pembebasan imbalan Administrasi atau imbalan bunga Pajak tunggangan Bermotor (PKB)
- b. Pembebasan utama Bea Pengembalian Nama kendaraan Bermotor untuk Pengajuan ke 2 dan Selanjutnya Peraturan Gubernur berlaku bagi wajib pajak yg mendaftarkan serta melakukan pembayaran semenjak bertepatan pada lepas 28 November 2018 atau 28 Desember 2018.

Kebijakan pemrograman hukum berimbang dilakukan melalui peningkatan akurasi isu serta data akibat pajak dan bukan pajak dan perhitungan elastis aturan alokasi biasa dan kebijakan pemrograman lainnya. Pendapat hukum tadi dicoba menggunakan mendesak aktivitas mirip BUMN pada Provinsi Sumatera Utara yg bisa menyalurkan aturan pembangunan masyarakat melalui hukum Pendapatan dan Belanja wilayah (APBD), dan memperjuangkan aturan tadi buat selalu membagi laba dari produk CPO yang ialah keliru satu bagian asal akibat yang disampaikan di Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Upaya peningkatan berasal pendapatan wilayah ditempuh melalui program peningkatan pendapatan daerah sinkron Konsep rencana Kerja aktivitas Badan Penanggulangan Pajak dan Retribusi wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 menjadi pemaparan Konsep Pembangunan Menengah saat daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.

sesuai hasil rekonsiliasi (pemulihan) berasal data informasi kas awam Provinsi Sumatera Utara, Pendapatan asli Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 sebanyak Rp. 5.860.984.033.590,97,- (102,24%) berasal sasaran sebanyak Rp. lima.732.425.486.154,00,-. umumnya, realisasi pendapatan tahun 2018 sudah berhasil target yang telah diresmikan, tetapi ada asal pendapatanyang belum tercapai. planning penerimaan pendapatan

SKPD : Program Kegiatan Rekapitulasi anggaran Daerah

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	DANA	REALISASI		
		DPA - APBD (Rp)	S/D BULAN INI		SISA ANGGARAN s/d BULAN INI APBD (Rp)
			KEUANGAN (Rp)	% APBD	
1	2	3	4	5	6
4.04.4.04.09.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.505.340.575.-	961,697,056	50.40%	946,520,552
4.04.4.04.09.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	10.500.000.-	1,398,000	6.59%	19,812,000
4.04.4.04.09.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	178.644.475.-	164,213,500	82.11%	35,785,808
4.04.4.04.09.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	171.994.500.-	122,558,800	76.60%	37,435,700
4.04.4.04.09.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	15.000.000.-	6,339,500	10.19%	55,845,500
4.04.4.04.09.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	190.000.000.-	251,411,756	41.90%	348,588,244
4.04.4.04.09.01.19	Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis administrasi perkantoran	939.201.600.-	415,775,500	48.08%	449,053,300
4.04.4.04.09.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	902,174,177	254,263,813	29.40%	647,910,364
4.04.4.04.09.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	173.015.495.-	-	0.00%	186,254,755
4.04.4.04.09.02.10	Pengadaan Mebeleur	173.155.210.-	-	0.00%	197,408,000
4.04.4.04.09.02.11	Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya	191.356.800.-	176,846,400	94.21%	10,877,750
4.04.4.04.09.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	192,312,272	21,191,000	11.02%	171,121,272
4.04.4.04.09.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional	138,475,000	56,226,413	40.60%	82,248,587

4.04.4.04.09.03	Program peningkatan disiplin aparatur	210,597,276	0	0.00%	210,597,276
4.04.4.04.09.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	90,597,276	-	0.00%	90,597,276
4.04.4.04.09.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu	120,000,000	-	0.00%	120,000,000
4.04.4.04.09.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1,280,322,200	419,326,000	32.75%	860,996,200
4.04.4.04.09.05.97	Peningkatan Pengembangan Kapasitas SDM	505,000,000	-	0.00%	505,000,000
4.04.4.04.09.05.174	Pembinaan bendahara pengeluaran dan penerimaan	100,000,000	-	0.00%	100,000,000
4.04.4.04.09.05.176	Bimbingan teknis penatausahaan SPJ SKPD	176,008,750	-	0.00%	176,008,750
4.04.4.04.09.05.232	Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah	499,313,450	419,326,000	83.98%	79,987,450
4.04.4.04.09.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1,835,312,500	569,445,500	31.03%	1,265,867,000
4.04.4.04.09.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	28,050,000	-	0.00%	28,050,000
4.04.4.04.09.06.05	Penyusunan Renja	33,512,500	-	0.00%	33,512,500
4.04.4.04.09.06.06	Penyusunan LAKIP	45,375,000	-	0.00%	45,375,000
4.04.4.04.09.06.22	Koordinasi Tim Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1,705,000,000	569,445,500	33.40%	1,135,554,500
4.04.4.04.09.06.32	Penyusunan buku Anggaran Kas Kota Medan	23,375,000	-	0.00%	23,375,000
2.04.4.04.09.16	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	2,429,400,000	11,262,040	0.46%	2,418,137,960
2.04.4.04.09.16.01	Sertifikasi Aset Daerah	2,429,400,000	11,262,040	0.46%	2,418,137,960
4.04.4.04.09.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	5,332,137,882	1,302,258,900	24.42%	4,029,878,982
4.04.4.04.09.17.22	Penyusunan rancangan peraturan daerah dan peraturan KDH tentang APBD	308,284,962	33,000,000	10.70%	275,284,962
4.04.4.04.09.17.33	Penyusunan rancangan peraturan daerah dan peraturan KDH tentang perubahan APBD	297,800,000	-	0.00%	297,800,000
4.04.4.04.09.17.48	Pendampingan penatausahaan keuangan SKPD	110,000,000	900,000	0.82%	109,100,000
4.04.4.04.09.17.49	Fasilitasi penyusunan belanja gaji	356,251,640	335,775,000	94.25%	20,476,640
4.04.4.04.09.17.50	Penatausahaan belanja bantuan hibah dan sosial / Belanja Fotocopy	164,563,980	47,067,800	28.60%	117,496,180
4.04.4.04.09.17.54	Monitoring SPM TU SKPD	177,700,000	-	0.00%	177,700,000
4.04.4.04.09.17.59	Sosialisasi Peraturan Walikota tentang pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial	40,428,300	26,994,000	66.77%	13,434,300
4.04.4.04.09.17.62	Pembenahan dan penataan dokumen keuangan	92,983,500	8,170,000	8.79%	84,813,500

4.04 . 4.04.09 . 17 . 65	Penataan dokumen arsip perbendaharaan	78,625,500	-	0.00%	78,625,500
4.04 . 4.04.09 . 17 . 99	Koordinasi Tim anggaran pemerintah daerah	3,705,500,000	850,352,100	22.95%	2,855,147,900
4.01 . 4.04.09 . 30	Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar	160,390,062	0	0.00%	160,390,062
4.01 . 4.04.09 . 30 . 03	Perayaan Hari Jadi Kota Medan	160,390,062	-	0.00%	160,390,062
4.01 . 4.04.09 . 35	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah	4,426,738,310	642,784,750	14.52%	3,783,953,560
4.01 . 4.04.09 . 35 . 02	Inventarisasi Barang Milik Daerah Kota Medan	1,120,000,000	1,415,000	0.13%	1,118,585,000
4.01 . 4.04.09 . 35 . 07	Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kota Medan	102,500,000	-	0.00%	102,500,000
4.01 . 4.04.09 . 35 . 10	Penyusunan Peraturan Daerah / Peraturan Walikota Barang Milik Daerah Kota Medan	272,500,000	-	0.00%	272,500,000
4.01 . 4.04.09 . 35 . 11	Koordinasi Pengelolaan barang Milik Daerah Kota Medan	2,036,500,000	571,913,150	28.08%	1,464,586,850
4.01 . 4.04.09 . 35 . 13	Koordinasi , Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah	172,978,310	2,550,000	1.47%	170,428,310
4.01 . 4.04.09 . 35 . 17	Pengelolaan Aplikasi Barang Milik Daerah	357,860,000	-	0.00%	357,860,000
4.01 . 4.04.09 . 35 . 20	Focus Group Discussion Barang Milik Daerah	281,000,000	66,906,600	23.81%	214,093,400
4.01 . 4.04.09 . 35 . 21	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan HPL dan Hak Pakai	83,400,000	-	0.00%	83,400,000
JUMLAH KESELURUHAN		18,485,290,015	4,161,038,059	22.51%	14,324,251,956

KESIMPULAN

Rencana Kerja Perangkat daerah RENJA artinya dokumen pemrograman, perencanaan serta perangkat wilayah pada kurun waktu satu tahun yang berisi program, aktivitas, jabatan dan kelompok target disertai indikator kinerja serta kemampuan dan pendanaan sinkron menggunakan kewajiban serta fungsi masing-masing perangkat daerah yg disusun sesuai rencana Kerja Perangkat daerah dan berpedoman pada

planning Strategis Perangkat daerah (RKPD). Rencana Kerja Perangkat wilayah adalah tahapan prinsip di penyusunan RKA Perangkat wilayah, yg di tataran kategorisasi rencana Kerja Perangkat daerah mampu diamati pada bagian ketujuh tentang hukum cara kategorisasi rencana Kerja Perangkat daerah pasal 125 sampai menggunakan 135.

Di planning Kerja Perangkat daerah sudah disesuaikan menggunakan Permendagri nomor 86 Tahun 2017 pasal 129 yang akan terjadi perumusan rancangan awal rencana Kerja Perangkat daerah sebagaimana dimaksud di pasal 128, tersaji menggunakan sangat sedikit pengaturan yang berisi: pendahuluan, evaluasi atau dampak penilaian rencana Kerja Perangkat daerah, tujuan dan sasaran perangkat wilayah, serta rencana kerja serta pendanaan perangkat daerah.

Penyusunan rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset wilayah Kota Medan disusun sebagai pedoman untuk memberikan arah serta kebijakan pada rangka melaksanakan, menjaga konsistensi dan integrasi dalam perencanaan, penganggaran dan pengawasan program/aktivitas di rangka mencapai sasaran strategis. Menggunakan demikian, dokumen Renja BPKAD Tahun 2023 menjadi pedoman serta arahan di penyusunan aturan BPKAD dan sebagai dasar penetapan KUA dan PPAS, serta RKA APBD Tahun hukum 2023 oleh kepala BPKAD Kota Medan.

Bisa melaksanakan kebijakan yang telah diformalkan pada kategorisasi penyusunan rencana Kerja pada lingkungan Satuan Kerja Perangkat wilayah Kota Medan sehingga Badan Keuangan dan Aset daerah Kota Medan menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan pada meningkatkan Pendapatan asli daerah (PAD) dimana program tadi mencakup kearifan, memikirkan sumber daya yang ada dalam organisasi, detail dan diimbangi memakai fungsi organisasi. Pemaparan rencana kerja program aktivitas ini artinya bentuk kegiatan yg disusun serta akan dilaksanakan pada saat satu tahun pada rangka mencapai tujuan serta target dan target pada perwujudan visi, misi serta sasaran yg sudah ditetapkan.

SARAN

berdasarkan hasil analisis yg telah dilakukan pada penelitian ini, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. buat Pihak SKPD

- a. SKPD Pemerintah Kabupaten Kota Medan wajib terus menaikkan rasa disiplin dan menaikkan kinerja sesuai baku operasional supaya pelayanan publik pada rakyat bisa lebih ditingkatkan. Bagi Pemerintah Kota Medan yg telah memperoleh opini WTP atas laporan keuangan tahun 2021, bisa lebih meningkatkan penerapan SAP, memberikan pembinaan langsung kepada pegawainya buat menambah

pengetahuan terkait laporan keuangan, dan menaikkan pengendalian internal di setiap OPD, sebagai akibatnya laporan keuangan yang didapatkan akan lebih baik serta mampu mempertahankan opini lumrah tanpa pengecualian berasal BPK buat tahun-tahun berikutnya.

dua.

2. Bagi Pegawai Pemerintah Kota Medan

- b. Peneliti menyarankan supaya pegawai pada lingkungan SKPD Pemerintah Kota Medan lebih berperan dan pada mempertinggi kualitas laporan keuangan daerah sebagai akibatnya terwujud good governance.
- c. Peneliti menyarankan agar pimpinan di masing-masing SKPD pemkot Medan usahakan lebih memantau kinerja bawahannya pada menyusun laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi jurnal

- [1] Abdurrahman Jafar. SISTEM MANAJEMEN KINERJA KEUANGAN DAN ADMINISTRASI DI KANTOR PEMERINTAH .2021 (Banda Aceh)
- [2] Zanaria Yulita, Aris Suntoyo (2021) ANALISIS KINERJA BADAN PENGELOLAAN ASET DAN KEUANGAN DAERAH (BPKAD) KOTA METRO. Volume 4 Nomor 5

Referensi buku

- [1] Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan. PETA PROSES BISNIS Bkad Kota Medan (2022)
- [2] Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan. Rencana Kerja (RENJA). Medan (2021)
- [3] Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Medan. Struktur Organisasi Bkad Kota Medan. Medan (2021)
- [4] Dra Zainarti. MANEJEMAN SUMBER DAYA MANUSIA. Medan (2021)
- [4] Husein Umar. 2009. Rencana Kerja Perusahaan Yang Baik. Jakarta: Rajawali.
- [5] Wahyudiono, Bambang. 2014. Mudah Membaca Laporan Keuangan. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- [6] Wijayanto, Dian. Pengantar Manajemen. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2012.

website

- [1] <http://bpkad.pemkomedan.go.id/>

[2] <https://jdih.pemkomedan.go.id/jdih/>